

**DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
DI DINAS SOSIAL PPPA KOTA MADIUN**

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA UNIFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Data Kemiskinan (penerima bantuan PKH,BPNT,Hibah dll)	UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ps 26:Perlindungan Hak Pribadi. 2.PP 82/2012 tentang sistem dan transaksi elektronik	Dinas Sosial PPPA	Selama statusnya berhak mendapat bantuan kemiskinan	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yg tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi	
2	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	UU 35/2014 tentang perubahan UU no23/2002 tentang Perlindungan Anak	Dinas Sosial PPPA	Selama berstatus anak	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan	Perlindungan Hak Hak Anak dan member ruang gerak pada anak .	
3.	Data klien PPT	Peraturan Pemerintah no 9tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu	Dinsos PPPA	Selama peraturan belum dicabut	Merampas hak azazi klien	Permasalahan bisa segera diatasi tanpa membuka aib klien	
4.	Data Calon Pemenang lomba (adm PKK, P2WKSS ,BBGRM DLL)	UU 14 tahun 2006 ps 17 tentang keterbatasan informasi publik, Permen Dagri No. 26 tahun 2009	Dinsos PPPA	Sampai diumumkan pemenang	Mempengaruhi jalannya penjurian	Penjurian /penilaian berjalan lancar	
5	Informasi uji Laboratorium sampel tanah dan benih sebelum di rilis ke masyarakat		Dinas Pertanian	Selama proses pengujian	Mempengaruhi jalannya pengujian	Pengujian berjalan lancar	
6	Informasi apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi						
	1.	Riwayat dan kondisi calon pegawai	Pasal 17 huruf H UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbatasan informasi publik	Dinas Sosial PPPA	Selama proses pengujian	Mempengaruhi jalannya pengujian	Seleksi penerimaan calon pegawai menjadi lancar
		Biodata pegawai	UU No. 8 tahun 1975 tentang pokok-pokok kepegawaian UU No. 43 tahun 1999	Dinas SOSIAL PPPA	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjadi privasi dan melindungi penyalahgunaan data bersangkutan
	2.	Kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank seseorang	Pasal 17 huruf 3 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dinas Sosial PPPA			
	a.	Laporan keuangan yang	Kemendagri tentang	Dinas Sosial	Sampai audit selesai	Informasi belum terjamin	Laporan keuangan yang

		belum di audit	transparansi pengelolaan keuangan daerah	PPPA		kebenarannya	belum di audit tidak bisa diekspos
	b.	Kode PIN Rekening Bank Pegawai	UU No. 11 tahun 28 tentang ITE pasal 1 angka 6	Dinas Sosial PPPA	Selama persetujuan yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Rekening Bank
	3.	Hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, Intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 tahun 2018 tentang KIP	Dinas Sosial PPPA			
	a.	Daftar nilai DP3 Pegawai, daftar nilai DP3	PP No.10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	Dinas Sosial PPPA	Selama periode penilaian yang dilakukan	Menjadikan data publik PNS bersifat rahasia	Melindungi Privasi data Pribadi
7.		Surat surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan Konfidensial	Permen PAN dan reformasi birokrasi No. 80 Pemerintah	Dinas Sosial PPPA	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat kebijakan pimpinan	Menjaga kerahasiaan data pemerintah
8.		Dokumen penawaran Kontrak Pengadaan barang dan Jasa	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa	Dinas Sosial PPPA	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat	Bisa menjadi ketidakakuratan dan obyektifitas dalam penilaian
			Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa	Dinas Sosial PPPA	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat	Bisa menjadi keakuratan dan obyektifitas penilaian
9.		Kode akses /Password aplikasi Elektronik	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Dinas Sosial PPPA	Selama password/kode berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik
10.		Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Dinas Sosial PPPA	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.		Pengaduan	UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Dinas Sosial PPPA	Selama Proses pengaduan selesai	Mengungkapkan data pribadi pengadu	Menjaga privasi dan pengamanan

Madiun, 27 Desember 2017

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial PP PA
Kota Madiun

HERI SUWARTONO, S.Sos.,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP.19720505 199101 1 002

